

LAPORAN TRIWULAN II 2024



**BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena atas Anugerah dan cinta kasihnya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Triwulan II Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024

Laporan Kinerja ini disusun dari hasil pengukuran kinerja sampai dengan periode Triwulan II Tahun Anggaran 2024 untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan harus di capai, juga sebagai bahan evaluasi dalam rangka upaya perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.

Secara umum, target dan sasaran kinerja periode Triwulan II Tahun 2024 ini telah dapat dicapai sesuai yang di targetkan. Pencapaian yang baik pada periode ini patut kita syukuri, namun demikian pencapaian tersebut masih awal dan perlu diikuti dengan peningkatan dan pengawalan atas capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja ke depan sampai dengan berakhirnya Tahun 2024. Komitmen dan kerjasama semua pihak, baik jajaran internal Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT maupun pihak lainya perlu di jaga untuk mencapai kinerja yang telah ditargetkan.

Terimakasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak, atas tersusunya laporan ini. Kami berharap kritik membangun untuk peningkatan kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT. Semoga laporan kinerja triwulan II Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kupang, Juli 2024

Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Drs. BENHARD MENO, MT
PEMBINA TINGKAT I (IV/B)
NIP. 19720512 199101 1 001

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iv

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	1
1.3 Maksud Dan Tujuan	3
1.4 Organisasi dan Personalia	3
1.5 Sistematika Penyajian	6

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
2.1 Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Keuangan Daerah	7
2.2 Target Kinerja.....	7
2.3 Perencanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah TA. 2024.....	10

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	16
3.1 Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian	16
A. Pelayanan Administrasi dan Umum.....	16
B. Kepegawaian	17
3.2 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	19
A. Realisasi Anggaran pada Badan Keuangan Daerah.....	19
1. Realisasi Pendapatan	20
2. Realisasi Belanja	25
B. Kinerja Badan Keuangan Daerah.....	31
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	35

BAB IV PENUTUP	60
4.1 Permasalahan dan Solusi	60
1. Sekretariat	60
2. Anggaran	60
3. Bidang Perbendaharaan	61
3. Bidang Akuntansi dan Pelaporan	61
4. Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota	62

BAB IV PENUTUP	64
-----------------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah.....	5
---	---

DAFTAR TABEL

2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Badan Keuangan Daerah	8
2.2 Penganggaran Badan Keuangan Daerah TA. 2024	10
3.1 Rekapitulasi Surat Masuk	16
3.2 Rekapitulasi Surat Keluar	16
3.3 Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional.....	17
3.4 Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan	17
3.5 Komposisi Pegawai berdasarkan Agama.....	18
3.6 Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan Umum.....	18
3.7 Komposisi Tenaga Kontrak	19
3.8 Realisasi Pendapatan pada Badan Keuangan.....	20
3.9 Realisasi Anggaran Belanja pada Badan Keuangan Daerah.....	25
3.10 Hasil Pelaksanaan Tugas Bidang Anggaran.....	37
3.11 Hasil Pelaksanaan Tugas Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota.....	39
3.12 Hasil Pelaksanaan Tugas Bidang Perbendaharaan.....	48
3.13 Hasil Pelaksanaan Tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan Pemerintah daerah di bidang keuangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT pada Bulan Juni Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan berbagai program kegiatan dan berbagai program kegiatan tersebut dilaksanakan dengan maksud agar seluruh rencana program dan kegiatan dapat terealisasi, terarah dan tepat sasaran.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pada Bulan Juni 2024 maka disusunlah Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Bulan Juni Tahun Anggaran 2024 yang diharapkan dapat menjadi informasi tentang kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan Akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang. Peningkatan kinerja diperlukan agar Badan Keuangan Daerah dapat lebih meningkatkan tugas dan fungsinya dalam rangka berperan memberikan dukungan teknis dan administrasi di bidang keuangan daerah.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.

- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810)
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah ;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- l. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- m. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 002; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0122).

- n. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penatausahaan, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaian serta Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2017.
- o. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- p. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Bulan Juni Tahun 2024 Badan Keuangan Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Kinerja Bulan Juni Tahun 2024 Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT adalah untuk menilai serta mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT dengan dasar evaluasi yang dilakukan, selanjutnya dirumuskan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang guna peningkatan kinerja.

1.4 Organisasi dan Personalia

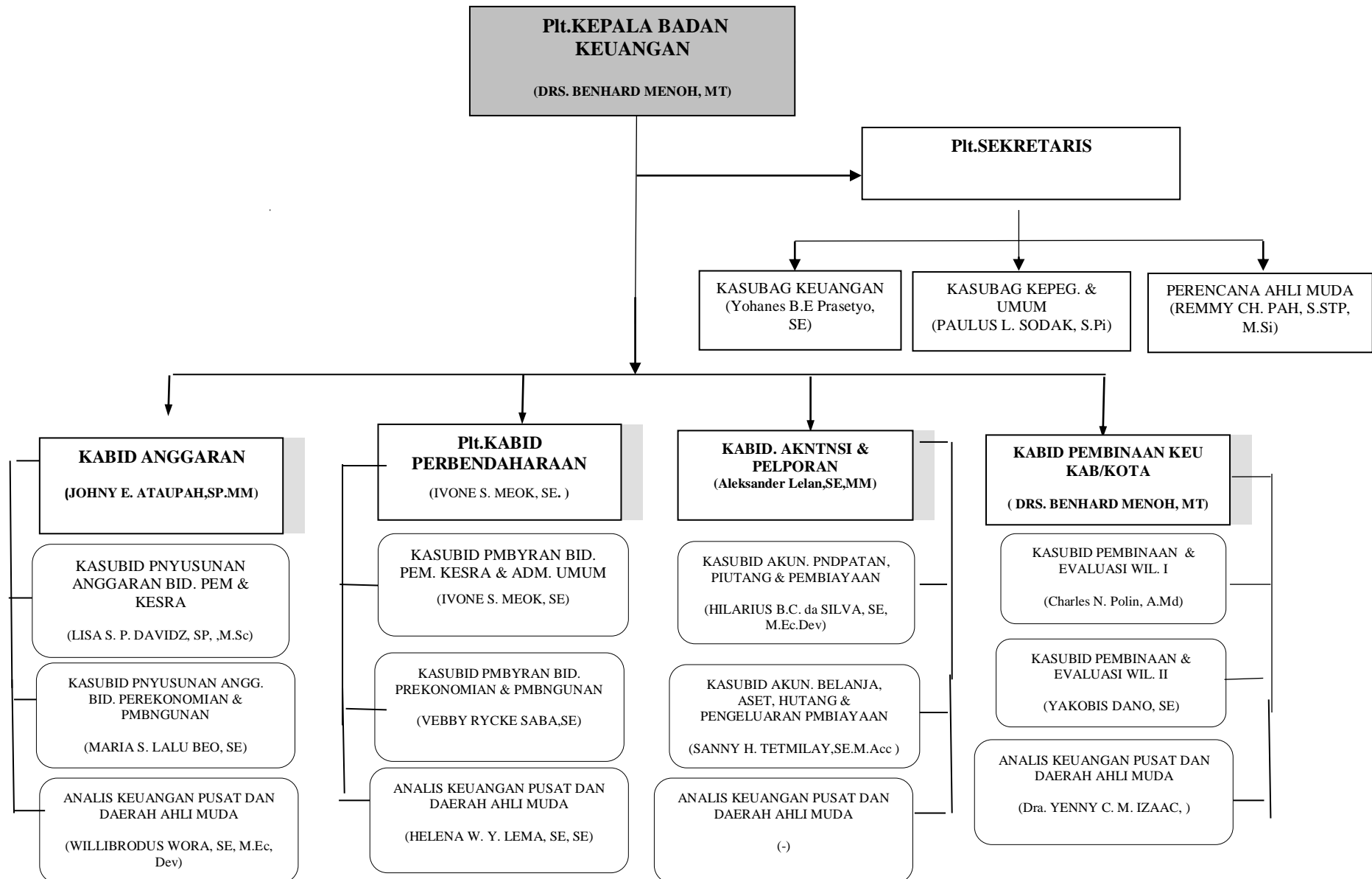
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, struktur Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT terdiri dari :

- a. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1) Sub Keuangan
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- b. Bidang Anggaran, terdiri atas :

- 1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan.
 - 2) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
- c. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas :
- 1) Sub Bidang Pembayaran Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum.
 - 2) Sub Bidang Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
- d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas :
- 1) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan.
 - 2) Sub Bidang Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan.
- e. Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten /Kota, terdiri atas :
- 1) Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I.
 - 2) Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah II.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional tertentu.

Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



1.5 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Kinerja Bulan Juni Tahun 2024 ini secara umum menginformasikan capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Bulan Juni 2024. Membandingkan antara capaian kinerja dengan rencana kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari hasil analisis terhadap celah kinerja tersebut, dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan pola pikir dimaksud, sistematika penyajian Laporan Kinerja Bulan Juni Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Organisasi dan Personalia
- 1.5 Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1 Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah
- 2.2 Target Kinerja

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian
- 3.2 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

BAB IV PERMASALAHAN DAN SOLUSI

- 4.1 Permasalahan
- 4.2 Solusi

BAB V PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah.
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah.
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah.
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan daerah.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Target Kinerja

Pada tahun 2023, Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT adalah untuk mewujudkan manajemen target kinerja jangka menengah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BADAN KEUANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			AWAL	2023	
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100%	100%	$\frac{\text{Jumlah dokumen yang di hasilkan secara tepat waktu}}{\text{Jumlah seluru dokumen yang di hasilkan}} \times 100\%$
2.	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Secara Optimal	Persentase Renperda APBD Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Tepat Waktu	-	100%	$\frac{\text{Jumlah Ranperda APBD Kab/Kota yang Difasilitasi tepat waktu}}{\text{Jumlah Ranperda APBD Kab/Kota yang Diajukan}} \times 100$

No.	Program		Anggaran		Target
1.	APBD				
	A.	Belanja (Program)	Rp.	885.827.685.130,-	Realisasi minimal 85%
	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	16.683.757.116,-	Realisasi minimal 90%
	2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.	869.143.928.014,-	Realisasi minimal 85%
	B	Pendapatan	Rp.	3.538.297.839.999,-	Realisasi minimal 90%
		Jumlah Belanja+Pendapatan (APBD)	Rp.	4.441.934.345.095,-	Realisasi minimal 90%
2	APBN				
	A.	Program Dekonsentrasi	Rp.	-	-
	1		Rp.	-	-
	B	Program Tugas Pembantuan	Rp.	-	-
	1		Rp.	-	-
	Jumlah Dekonsentrasi + Tugas Pembantuan		Rp.	-	-

Sumber : Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT

2.3 Perencanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah TA. 2024

Berdasarkan DPA Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024, penganggaran Badan Keuangan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Perencanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024

						KEUANGAN	885.827.685.130
0	0	0	2			Badan Keuangan Daerah	885.827.685.130
0	1					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.683.757.116
1	1	0	1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	375.298.517
1	1	0	1	0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	69.246.000
1	1	0	1	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	109.910.848
1	1	0	1	0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	76.433.569
1	1	0	1	0	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	119.708.100
1	1	0	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.355.860.600
1	1	0	2	0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.767.552.000
1	1	0	2	0	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.023.606.600
1	1	0	2	0	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	189.609.000
1	1	0	2	0	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	85.330.000
1	1	0	2	0	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	78.423.000
1	1	0	2	0	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	65.519.000
1	1	0	2	0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	99.509.000

1	1	0	2	0	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	46.312.000
1	1	0	3			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	137.158.000
1	1	0	3	0	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	66.079.000
1	1	0	3	0	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	71.079.000
1	1	0	5			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	525.843.000
1	1	0	5	0	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	161.079.000
1	1	0	5	0	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	91.079.000
1	1	0	5	0	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000
1	1	0	5	0	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	173.685.000
1	1	0	6			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.886.875.956
1	1	0	6	0	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.079.000
1	1	0	6	0	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	56.189.000
1	1	0	6	0	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	355.243.520
1	1	0	6	0	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72.500.000
1	1	0	6	0	7	Penyediaan Bahan/Material	200.000.000
1	1	0	6	0	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	680.829.000
1	1	0	6	0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	419.129.000
1	1	0	6	0	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	31.906.436

1	1	0	7			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	234.255.131
1	1	0	7	0	5	Pengadaan Mebel	38.824.000
1	1	0	7	0	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	195.431.131
1	1	0	8			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.812.245.912
1	1	0	8	0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.565.400
1	1	0	8	0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	875.000.000
1	1	0	8	0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.900.680.512
1	1	0	9			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	356.220.000
1	1	0	9	0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	236.820.000
1	1	0	9	0	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.400.000
1	1	0	9	0	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	20.000.000
0	2					PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	869.143.928.014
2	2	0	1			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	10.143.053.325
2	2	0	1	0	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	395.289.000
2	2	0	1	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	449.197.000
2	2	0	1	0	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	365.134.000
2	2	0	1	0	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	384.373.000
2	2	0	1	0	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2.982.692.362
2	2	0	1	0	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2.876.497.000
2	2	0	1	0	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2.689.870.963

2	2	0	2			Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	2.261.827.005
2	2	0	2	0	2	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	434.038.000
2	2	0	2	0	3	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	435.568.000
2	2	0	2	0	4	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	442.494.000
2	2	0	2	0	5	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	732.006.500
2	2	0	2	0	7	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	116.170.000
2	2	0	2	0	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	101.750.505
2	2	0	3			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	2.380.003.796
2	2	0	3	0	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	414.559.796
2	2	0	3	0	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	322.083.000
2	2	0	3	0	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	385.216.000
2	2	0	3	0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	665.180.000

2	2	0	3	0	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	592.965.000
2	2	0	4			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2.815.638.502
2	2	0	4	0	2	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan kas dan Pengeluaran Kas Daerah	331.735.212
2	2	0	4	0	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	561.726.990
2	2	0	4	0	4	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	771.670.000
2	2	0	4	0	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1.150.506.300
2	2	0	5			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	851.543.405.386
2	2	0	5	0	4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	57.933.263.642
2	2	0	5	0	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	9.372.905.000
2	2	0	5	0	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	73.045.924.489
2	2	0	5	0	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	711.191.312.255

BAB III
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian

A. Pelayanan Administrasi dan Umum

1. Surat Masuk

Tabel 3.1
Rekapitulasi Surat Masuk Badan Keuangan Daerah Prov. NTT
April s.d Juni 2024

Unit	April	Mei	Juni
Sekretariat	48	73	50
Bidang Anggaran	70	121	73
Bidang Akuntansi dan Pelaporan	64	67	50
Bidang Pembinaan Keuangan Kab/Kota	13	29	22
Bidang Perbendaharaan	111	131	141

Sumber : Sekretariat Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

2. Surat Keluar

Tabel 3.2
Rekapitulasi Surat Keluar Badan Keuangan Daerah Prov. NTT
April s.d Juni 2024

Unit	April	Mei	Juni
Sekretariat	48	73	50
Bidang Anggaran	70	121	73
Bidang Akuntansi dan Pelaporan	64	67	50
Bidang Pembinaan Keuangan Kab/Kota	13	29	22
Bidang Perbendaharaan	111	131	141

Sumber : Sekretariat Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

B. Kepegawaian

Keadaan pegawai pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berjumlah 64 orang, dengan perincian sebagai berikut (sampai dengan 30 Juni 2024).

1. Berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional

Tabel 3.3

Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional

April s.d Juni 2024

NO	JABATAN	JUMLAH	TINGKATAN (eselon/ jenjang)	Ket
1.	Kepala Badan	0 orang	II-a	Ada
2.	Sekretaris	0 orang	III-a	Ada
3.	Kepala Bidang	3 orang	III-a	Ada
4.	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang	13 orang	IV-a	Ada
5.	Kelompok Jabatan Fungsional.	48 orang		Ada
Total		64 orang		

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

2. Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

Tabel 3.4

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

April s.d Juni 2024

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		GOLONGAN			
		L	P	I	II	III	IV
1.	Sekretariat	8	7	-	1	14	0
2.	Bidang Anggaran	6	4	-	2	5	3
3.	Bidang Perbendaharaan	3	9	-	-	13	0
4.	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	6	10	-	-	13	2
5.	Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota	6	5	-	1	8	2
Jumlah		31	35		4	53	7
Total		64		64			

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

3. Berdasarkan Agama

Tabel 3.5
Komposisi Pegawai Berdasarkan Agama
April s.d Juni 2024

NO	UNIT KERJA	AGAMA				
		KP	KK	Islam	Hindu	Budha
1.	Sekretariat	8	5	1	-	-
2.	Bidang Anggaran	9	3	-	-	-
3.	Bidang Perbendaharaan	6	6	1	-	-
4.	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	7	6	1	-	-
5.	Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota	8	1	1	1	-
<i>Jumlah</i>		38	21	4	1	-
<i>Total</i>		64				

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

4. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 3.6
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Umum
April s.d Juni 2024

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN						
		SD	SLTP	SLTA	D.I II/ III	D.IV	S1	S2
1.	Sekretariat	-	-	2	-	1	10	1
2.	Bidang Anggaran	-	-	-	2	-	7	3
3.	Bidang Perbendaharaan	-	-	-	3	-	10	0
4.	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	-	-	-	1	-	7	6
5.	Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota	-	-	3	-	-	5	3
<i>Jumlah</i>		-	-	5	6	1	39	13
<i>Total</i>		64						

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

5. Tenaga Kontrak

Tabel 3.7.
Komposisi Tenaga Kontrak Daerah
April s.d Juni 2024

NO	TENAGA KONTRAK	JUMLAH
1.	LAKI-LAKI	40
2	PEREMPUAN	30
Total		70 orang

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

3.2 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

A. Realisasi Anggaran pada Badan Keuangan Daerah

1. Realisasi Pendapatan

Pada Tahun Anggaran 2024, Target Pendapatan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT sebesar **Rp. 3.538.297.839.999,-**. Berikut adalah realisasi Pendapatan Daerah kondisi 30 Juni 2024:

Tabel. 3.8
Realisasi Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah
per 30 Juni 2024

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.	PENDAPATAN DAERAH	3.538.297.839.999	1.785.517.529.853	87,65
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	146.906.126.999	5.744.831.657	7,35
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	68.769.178.857	-	0,00
4.1.03.01.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	68.769.178.857	-	0,00
4.1.03.01.01.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	67.000.000.000	-	0,00
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.500.000.000		0,00
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	269.178.857		0,00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	78.136.948.142	5.744.831.657	7,35
4.1.04.05.	Jasa Giro	13.178.106.800	1.085.025.901	8,23
4.1.04.05.01.	Jasa Giro pada Kas Daerah	13.178.106.800	1.085.025.901	8,23
4.1.04.05.01.0001.	Jasa Giro pada Kas Daerah	13.178.106.800	1.085.025.901	8,23
4.1.04.07.	Pendapatan Bunga	1.317.810.700	174.841.758	13,27

4.1.04.07.01.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.317.810.700	174.841.758	13,27
4.1.04.07.01.0001.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.317.810.700	174.841.758	13,27
4.1.04.08.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	31.484.473.742	360.859.493	1,15
4.1.04.08.01.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	31.484.473.742	360.859.493	1,15
4.1.04.08.01.0001.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	31.484.473.742	360.859.493	1,15
4.1.04.11.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	30.166.662.900	415.994.205	1,38
4.1.04.11.01.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	30.166.662.900	415.994.205	1,38
4.1.04.11.01.0001.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	30.166.662.900	415.994.205	1,38
4.1.04.15.	Pendapatan dari Pengembalian	1.989.894.000	3.708.110.299	186,35
4.1.04.15.01.	Pendapatan dari Pengembalian kelebihan pembayaran gaji pokok ASN	658.905.300	35.387.714	5,37
4.1.04.15.01.0001.	Pendapatan dari Pengembalian kelebihan pembayaran gaji pokok ASN	658.905.300	35.387.714	5,37
4.1.04.15.03.	Pendapatan dari Pengembalian kelebihan belanja tunjangan pph/tunjangan khusus /tunjangan PPPK	13.178.100	33.423.719	253,63
4.1.04.15.03.0001.	Pendapatan dari Pengembalian kelebihan belanja tunjangan	13.178.100	33.423.719	253,63

	pph/tunjangan khusus /tunjangan PPPK			
4.1.04.15.04.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	1.317.810.600	3.639.298.866	276,16
4.1.04.15.04.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	1.317.810.600	3.639.298.866	276,16
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	3.388.843.369.000	1.779.064.366.729	52,50
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.388.843.369.000	1.779.064.366.729	376,97
4.2.01.01.	Dana Perimbangan	3.388.843.369.000	1.779.064.366.729	376,97
4.2.01.01.01.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	51.408.655.000	9.690.695.560	18,85
4.2.01.01.01.0001.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	3.056.511.000	578.240.710	18,92
4.2.01.01.01.0003.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	41.286.048.000	8.257.209.600	20,00
4.2.01.01.01.0004.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	5.860.079.000	312.537.600	5,33
4.2.01.01.01.0007.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	968.509.000	435.829.050	45,00
4.2.01.01.01.0008.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	237.508.000	106.878.600	45,00
4.2.01.01.01.0010.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	-	-	-
4.2.01.01.02.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.984.240.864.000	1.168.931.903.581	58,91
4.2.01.01.02.0001.	DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.658.080.793.000	949.420.265.048	57,26
4.2.01.01.02.0004	DAU tambahan dukungan Pendanaan atas Penggajian PPPK	43.823.096.000	7.758.910.533	17,71

4.2.01.01.02.0005	DAU yg ditentukan penggunaanya bidang Pendidikan	192.629.872.000	144.472.403.000	75,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yg ditentukan penggunaanya bidang Kesehatan	46.260.799.000	34.695.598.000	75,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yg ditentukan penggunaanya bidang Pekerjaan Umum	43.446.304.000	32.584.727.000	75,00
4.2.01.01.03.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	510.764.222.000	93.702.637.049	239,06
4.2.01.01.03.0004.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	92.390.362.000	22.848.340.500	24,73
4.2.01.01.03.0005.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	4.831.344.000	1.103.599.500	22,84
4.2.01.01.03.0051	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMK	125.285.584.000	23.580.863.800	18,82
4.2.01.01.03.0058	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB -Reguler Penguatan stunting	2.163.848.000		0,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB -Reguler Penguatan Kesehatan	24.158.001.000		0,00
4.2.01.01.03.0034.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	11.965.648.000		0,00
4.2.01.01.03.0030	DAK Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah -penugasan- pembangunan sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	7.500.000.000	4.254.686.000	56,73
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik Bidang Pertanian Penugasan/Renovasi sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	3.719.498.000		0,00
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	22.042.505.000		0,00
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik Bidang Jalan-Penugasan	55.208.659.000	2.991.412.000	5,42
4.2.01.01.03.0036	DAK Fisik-Bidang jalan-penugasan Keselamatan jalan	25.785.528.000	7.958.423.000	30,86
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang irigasi penugasan	10.082.131.000	2.518.930.250	24,98

4.2.01.01.03.0046	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan Kehutanan	15.903.365.000		0,00
4.2.01.01.03.0046	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan Penugasan tamtik peningkatan konektivitas daerah afirmasi	21.727.749.000	6.446.382.000	29,67
4.2.01.01.03.0065	DAK Fisik-Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan	88.000.000.000	21.999.999.999	25,00
4.2.01.01.04.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	842.429.628.000	506.739.130.539	60,15
4.2.01.01.04.0001.	DAK Non Fisik-BOS Reguler	520.085.370.000	259.839.345.000	49,96
4.2.01.01.04.0003.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	8.755.000.000	8.682.500.000	99,17
4.2.01.01.04.0004.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	279.652.282.000	223.721.825.600	80,00
4.2.01.01.04.0005.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	3.271.257.000	1.799.191.350	55,00
4.2.01.01.04.0006.	DAK Non Fisik-TKG PNSD	9.407.676.000	5.174.221.800	55,00
4.2.01.01.04.0009.	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	2.000.000.000	975.988.528	48,80
4.2.01.01.04.0010.	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	2.000.000.000	913.236.913	45,66
4.2.01.01.04.0011.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	10.535.381.000	2.595.217.194	24,63
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	1.719.244.000	802.098.534	46,65
4.2.01.01.04.0022	Dana Pelayanan Perlindungan Anak	342.000.000	109.940.580	32,15
4.2.01.01.04.0024	DAK Non Fisik Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	2.850.000.000	1.425.000.000	50,00
4.2.01.01.04.0016.	DAK Non Fisik-PK2UKM	1.811.418.000	700.565.040	38,67
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN	2.548.344.000	708.331.467	27,80

	DAERAH YANG SAH			
4.3.01.	Pendapatan Hibah	2.548.344.000	708.331.467	27,80
4.3.01.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.548.344.000	708.331.467	27,80
4.3.01.01.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.548.344.000	708.331.467	70,83
4.3.01.01.01.0001.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	548.344.000	-	0,00
4.3.01.04.01.0001.	Pendapatan Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Swasta Dalam Negeri	1.000.000.000	-	0,00
4.3.01.03.01.0001.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan	1.000.000.000	708.331.467	70,83
	JUMLAH	3.538.297.839.999	1.785.517.529.853	87,65

Sumber Bidang Perbendaharaan (BUD)

2. Realisasi Anggaran Belanja berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 Nomor : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2024, Belanja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 885.827.685.130,-** Pagu dan Realisasi Anggaran tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Belanja pada Badan Keuangan Daerah
per 30 Juni 2024

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
						KEUANGAN	885.827.685.130	279.935.620.291	31,60%
0	0	0	2			Badan Keuangan Daerah	885.827.685.130	279.935.620.291	31,60%
0	1					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.683.757.116	6.280.336.170	37,64%
1	1	0	1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	375.298.517	95.373.574	25,41%
1	1	0	1	0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	69.246.000	22.241.000	32,12%
1	1	0	1	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	109.910.848	20.244.400	18,42%
1	1	0	1	0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	76.433.569	29.514.000	38,61%
1	1	0	1	0	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	119.708.100	23.374.174	19,53%
1	1	0	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.355.860.600	3.795.875.894	40,57%
1	1	0	2	0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.767.552.000	3.130.230.119	46,25%
1	1	0	2	0	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.023.606.600	481.582.575	23,80%
1	1	0	2	0	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	189.609.000	59.475.500	31,37%
1	1	0	2	0	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	85.330.000	22.507.000	26,38%

1	1	0	2	0	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	78.423.000	15.754.200	20,09%
1	1	0	2	0	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	65.519.000	41.684.000	63,62%
1	1	0	2	0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	99.509.000	44.642.500	44,86%
1	1	0	2	0	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	46.312.000	-	-
1	1	0	3			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	137.158.000	33.574.300	24,48%
1	1	0	3	0	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	66.079.000	29.892.600	45,24%
1	1	0	3	0	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	71.079.000	3.681.700	5,18%
1	1	0	5			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	525.843.000	52.918.800	10,06%
1	1	0	5	0	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	161.079.000	37.778.500	23,45%
1	1	0	5	0	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	91.079.000	11.170.300	12,26%
1	1	0	5	0	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000	3.970.000	3,97%
1	1	0	5	0	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	173.685.000	-	-
1	1	0	6			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.886.875.956	694.834.885	36,82%
1	1	0	6	0	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.079.000	6.000.000	8,44%
1	1	0	6	0	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	56.189.000	6.908.750	12,30%

1	1	0	6	0	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	355.243.520	116.149.000	32,70%
1	1	0	6	0	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72.500.000	13.340.000	18,40%
1	1	0	6	0	7	Penyediaan Bahan/Material	200.000.000	70.962.289	35,48%
1	1	0	6	0	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	680.829.000	197.395.013	28,99%
1	1	0	6	0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	419.129.000	284.079.833	67,78%
1	1	0	6	0	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	31.906.436	-	-
1	1	0	7			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	234.255.131	9.990.000	4,26%
1	1	0	7	0	5	Pengadaan Mebel	38.824.000	-	-
1	1	0	7	0	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	195.431.131	9.990.000	5,11%
1	1	0	8			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.812.245.912	1.463.297.460	38,38%
1	1	0	8	0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.565.400	6.664.100	18,23%
1	1	0	8	0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	875.000.000	312.500.000	35,71%
1	1	0	8	0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.900.680.512	1.144.133.360	39,44%
1	1	0	9			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	356.220.000	134.471.257	37,75%
1	1	0	9	0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	236.820.000	134.471.257	56,78%

1	1	0	9	0	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.400.000	-	-
1	1	0	9	0	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	20.000.000	-	-
0	2					PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	869.143.928.014	273.655.284.121	31,49%
2	2	0	1			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	10.143.053.325	2.082.047.599	20,53%
2	2	0	1	0	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	395.289.000	92.532.000	23,41%
2	2	0	1	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	449.197.000	-	-
2	2	0	1	0	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	365.134.000	93.632.771	25,64%
2	2	0	1	0	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	384.373.000	136.451.000	35,50%
2	2	0	1	0	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2.982.692.362	219.954.200	7,37%
2	2	0	1	0	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2.876.497.000	1.112.537.000	38,68%
2	2	0	1	0	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2.689.870.963	426.940.628	15,87%
2	2	0	2			Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	2.261.827.005	548.580.149	24,25%
2	2	0	2	0	2	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	434.038.000	-	-

2	2	0	2	0	3	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	435.568.000	1.496.250	0,34%
2	2	0	2	0	4	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	442.494.000	53.476.000	12,09%
2	2	0	2	0	5	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	732.006.500	389.728.399	53,24%
2	2	0	2	0	7	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	116.170.000	43.590.500	37,52%
2	2	0	2	0	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	101.750.505	60.289.000	59,25%
2	2	0	3			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	2.380.003.796	665.562.966	27,96%
2	2	0	3	0	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	414.559.796	229.751.749	55,42%
2	2	0	3	0	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	322.083.000	108.598.418	33,72%
2	2	0	3	0	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	385.216.000	59.855.000	15,54%

2	2	0	3	0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	665.180.000	165.987.299	24,95%
2	2	0	3	0	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	592.965.000	101.370.500	17,10%
2	2	0	4			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2.815.638.502	1.919.624.314	68,18%
2	2	0	4	0	2	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan kas dan Pengeluaran Kas Daerah	331.735.212	195.647.000	58,98%
2	2	0	4	0	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	561.726.990	411.296.600	73,22%
2	2	0	4	0	4	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	771.670.000	417.996.282	54,17%
2	2	0	4	0	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan	1.150.506.300	894.684.432	77,76%

						Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi			
2	2	0	5			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	851.543.405.386	268.439.469.093	31,52%
2	2	0	5	0	4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	57.933.263.642	-	-
2	2	0	5	0	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	9.372.905.000	150.000.000	1,60%
2	2	0	5	0	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	73.045.924.489	71.761.000	0,10%
2	2	0	5	0	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	711.191.312.255	268.217.708.093	37,71%

Sumber : SPJ Belanja – Fungsional Juni 2024

B. Kinerja Badan Keuangan Daerah berdasarkan Program dan Kegiatan

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan Kinerja Badan Keuangan Daerah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Selama bulan Juni 2024, hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT yang menjadi tanggung jawab teknis dari Sekretariat berdasarkan DPA Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT TA. 2024 terdiri dari 14 kegiatan dan 40 sub kegiatan dimana setiap kegiatan dan sub kegiatan terbagi dalam 3 program, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD

Sub Bagian PDE bertanggungjawab untuk menangani kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Pagu sebesar Rp. 375.298.517,- Realisasi sebesar Rp. 95.373.574,- (25,41%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan,

- ⇒ Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2023 telah disusun pada Badan Keuangan Daerah Bulan Juni 2024;
- ⇒ Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
- ⇒ Tersusunnya LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)
- ⇒ Tersusunnya SK Pembentukan Pembantu Pejabat Pengelola Keuangan dan Dokumentasi pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024.
- ⇒ Tersusunnya SK Pejabat Pengelola Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024.
- ⇒ Laporan bulanan

b. Sub Kegiatan Administrasi Keuangan

Sub Bagian Keuangan bertanggungjawab menangani kegiatan Administrasi Keuangan Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, dan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran. Pagu sebesar Rp. 9.355.860.600,- Realisasi Rp. 3.795.875.894 (40,57%) Hasil (output) pelaksanaan kegiatan:

- ⇒ Tersusunnya Laporan Realisasi Keuangan
- ⇒ Terjawabnya temuan Inspektur Jenderal

- ⇒ Tersusunnya SK Penunjukkan/penetapan Pejabat Pengelola Keuangan kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024.
- ⇒ Tersusunnya SK Penunjukkan/penetapan Petugas Penyiapan SPP dan SPM kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, yang terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD. Pagu sebesar Rp. 137.158.000,- Realisasi Rp 33.574.300,- (24,48%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

- ⇒ Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah.

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Pagu sebesar Rp. 525.843.000,- Realisasi Rp. 52.918.800,- (10,06%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

- ⇒ Tersusunnya Laporan Budaya Kerja.
- ⇒ Penyelesaian Dokumen Kenaikan Pangkat.
- ⇒ Penyelesaian Dokumen Pensiun.
- ⇒ Tersusunnya Laporan Presentasi Kehadiran

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Bagian Keuangan bertanggungjawab menangani kegiatan Administrasi Umum PD yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyediaan Bahan/Material, Fasilitas Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD. Pagu sebesar Rp. 1.886.875.956,- Realisasi Rp.694.834.885,- (36,82%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

- ⇒ Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
- ⇒ Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
- ⇒ Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- ⇒ Tersedianya Bahan/Material

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Pagu sebesar Rp. 234.255.131,-Realisasi Rp. 9.990.000 ,- (4,26%).

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Melebihi Pagu Validasi. Pagu sebesar Rp. 3.812.245.912,- Realisasi Rp. 1.463.297.460,- (38,38%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan

- ⇒ Tersedianya Jasa Surat Menyurat

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Pagu sebesar Rp. 356.220.000,- Realisasi Rp. 134.471.257,- (37,75). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

⇒ Tersedianya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah ditangani oleh 4 Bidang yaitu Bidang Anggaran, Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota, Bidang Perbendaharaan dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Dari pagu sebesar Rp. 869.143.928.014,- Realisasi Rp. 273.655.284.121,- (31,49%). Berikut adalah realisasi kinerja per kegiatan :

a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Kegiatan ini ditangani oleh Bidang Anggaran dengan Pagu sebesar Rp. 10.143.053.325,- Realisasi Rp. 2.082.047.599,- (20,53%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

1. Koordinasi dan Penyusunan KUA-PPAS serta Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
2. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD serta Perubahannya;
3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD serta Perubahannya;

4. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD serta Perubahannya;
5. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran;
6. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan;
7. Penyusunan Petunjuk Teknis Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Menginventarisir pelaksanaan evaluasi Rencana Kerja Anggaran SKPD.
10. Konsultasi terkait Dokumen Laporan Rancangan Penggunaan Anggaran DAU Spesifik Grant Tahap I tahun 2024 (Inspektorat Daerah);
11. Koordinasi terkait untuk pengajuan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah);
12. Konsultasi terkait penginputan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 (Dinas Peternakan);
13. Konsultasi terkait Permasalahan Aplikasi Penginputan SIPD RI (Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumba Barat);
14. Konsultasi terkait Rencana Kerja Anggaran Pergeseran Anggaran (Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Setda);
15. Konsultasi terkait Dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 (Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan Setda).

Tabel 3.10

**Hasil Pelaksanaan Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah
per 30 Juni 2024**

Program	Rincian Kegiatan	Target (dokumen/kegiatan /buku)	Realisasi (dokumen/kegiatan /buku)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Koordinasi penyusunan dan verifikasi Dokumen Perubahan DPA-SKPD TA. 2024	- Proses Pencetakan dan Distribusi Dokumen Perubahan DPA-SKPD TA. 2024	Dokumen DPA-SKPD TA. 2024	Terealisasi
	2. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Peraturan APBD	- Rapat terkait Pembahasan Progres Pelaksanaan Tahap I dan Rencana Pelaksanaan Tahap II Kegiatan Sumber Dana DAU SG TA. 2024 Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan Bidang Pekerjaan Umum	Pembahasan ini sudah dilaksanakan	Terealisasi
		- Rapat terkait Usulan Pergeseran Anggaran pada DPA SKPD Tahun Anggaran 2024	Pembahasan ini sudah dilaksanakan	Terealisasi
	3. Koordinasi Dan Penyusunan KUA Dan PPAS	- Rapat terkait Pembahasan Penjelasan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Pemaparan Detail Perhitungan Target Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTT Tahun 2025 dan Bagi Hasil Kabupaten/Kota TA. 2025 dan Penjelasan Skema Rencana	Pembahasan ini sudah dilaksanakan	Terealisasi

		Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025		
		- Rapat terkait Pembahasan Penjelasan Skema Rancangan APBD TA. 2025 pada Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025	Pembahasan ini sudah dilaksanakan	Terealisasi
		- Rapat terkait Pembahasan dan Penyampaian Skema Rancangan APBD TA. 2025 pada Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025	Kegiatan ini sudah dilaksanakan	Terealisasi

b. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini ditangani oleh Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota dengan Pagu sebesar Rp 2.261.827.005,- Realisasi Rp. 548.580.149,- (24,25%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.11

**Hasil Pelaksanaan Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota Badan Keuangan
Daerah per 30 Juni 2024**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN /RINCIAN KERJA	BENTUK/ WUJUD	REALISASI	KETERANGAN
PROGRAM : PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
KEGIATAN : PEMBINAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
A.	Sub kegiatan : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota dengan rincian kegiatan sebagai berikut :			
	1. Rekapitulasi data Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Surat Gubernur Nomor 900/183/BKUD5.3/2023 Tanggal 25 Januari 2023 Hal Data Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah berkaitan dengan Pengelolaan	Data Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya data Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah. Kabupaten/Kota yang telah menyampaikan sebagai berikut : 1) Data Perda a. Kab. TTS b. Kab. Belu c. Kab. Rote Ndao d. Kab. Ngada	Data Perda masih tersisa 13 kab/kota sedangkan data Perkada yang belum menyampaikan tersisa 14 kab/kota

	Keuangan Daerah		e. Kab. Alor f. Kab. Sumba Timur g. Kab. TTU h. Kabupaten Kupang i. Kabupaten TTU 2) Data Perkada a. Kab. Ngada b. Kab. TTS c. Kab. Belu d. Kab. Rote Ndao e. Kab. Alor f. Kab. Sumba Timur g. Kab. TTU h. Kab. Malaka	
	2. Pelaksanaan Penandatanganan NPHD Pemilukada antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Kepolisian Daerah Provinsi NTT (Polda) dan Komando Resort Militer (Korem)	Penandatanganan NPHD Pemilukada antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Kepolisian Daerah Provinsi NTT (Polda) dan Komando Resort Militer (Korem)	Adanya Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemilukada antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Kepolisian Daerah Provinsi NTT (Polda) dan Komando Resort Militer (Korem)	Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis 13 Juni 2024.

B.	Sub kegiatan : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota			Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Oktober 2024
C.	Sub kegiatan : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dengan rincian kegiatan sebagai berikut :			Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2024
D.	Sub kegiatan : Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota dengan rincian kegiatannya yaitu Rapat Koordinasi Keuangan Daerah			
	1. Penyampaian rekapitulasi data sisa DBH-CHT dan surat pernyataan penganggaran kembali sisa DBH-CHT pada Perubahan APBD Tahun Anggaran	Surat pernyataan penganggaran kembali sisa DBH-CHT pada Perubahan APBD Tahun Anggaran	Terinformasi data pernyataan penganggaran kembali sisa DBH-CHT pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan	

	2024 dan APBD TA 2025 Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia	2024 dan APBD TA 2025 Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia	APBD TA 2025 Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia	
E.	Sub kegiatan : Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi Laporan Keuangan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah dengan rincian kegiatan sebagai berikut :			
	1. Mengikuti rakor pemantauan percepatan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah TA 2024 secara virtual /zoom meeting dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri	Rakor pemantauan percepatan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah TA 2024 secara virtual /zoom meeting dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri	Terinformasinya data realisasi APBD Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota ke Kemendagri	Kegiatan dilaksanakan hari selasa, 4 Juni 2024 secara virtual/zoom meeting

	2. Program Pengelolaan Keuangan daerah dengan rincian kegiatan Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada 22 Kabupaten/Kota	List rekapan LRA Kabupaten/Kota keadaan sampai dengan 30 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) dokumen	1 (satu) list rekapan LRA Kabupaten/Kota dan telah dikirimkan kepada Kemendagri, Bank Indonesia dan Kanwil Perbendaharaan Provinsi NTT serta Kantor DJP Pajak Pratama	Berlanjut untuk bulan Juli Tahun 2024 yang akan dilaporkan di bulan Agustus Tahun 2024
	3. Menyusun Data Statistik Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021	Draf daftar/list Data Statistik Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022	Draf data Statistik Keuangan Daerah Tahun 2022	Berlanjut untuk bulan-bulan berikutnya
	4. Konsep Statistik Keuangan Daerah Tahun 2022 untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota	Konsep Statistik Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023	Konsep Statistik Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023	Berlanjut untuk bulan-bulan berikutnya
F.	Sub kegiatan : Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota			
	1. Penyelesaian kelengkapan data laporan keuangan BLUD Kabupaten/Kota triwulan 2 semester 1 Tahun Anggaran 2024	Tabel data laporan keuangan BLUD Kabupaten/Kota triwulan 2 semester 1 Tahun Anggaran 2024	Tersedianya data laporan keuangan BLUD beberapa Kabupaten/Kota triwulan 2 semester 1 Tahun Anggaran 2024	
G.	Tugas Tambahan : Pelaksanaan Kegiatan Umum dengan rincian kegiatan sebagai berikut :			

	1. Penyusunan kerangka acuan evaluasi terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	kerangka acuan evaluasi terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Adanya kerangka acuan evaluasi terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
	2. Penyampaian Surat Gubernur Nomor 000.15/1092/BKUD5.2 Tanggal 5 Juni2024 hal Undangan	Surat Gubernur Nomor 000.15/1092/BKU D5.2 Tanggal 5 Juni2024 hal Undangan	Terinformasinya undangan kepada kabupaten/kota terkait pelaksanaan rapat koordinasi dalam rangka percepatan penyusunan KUA-PPAS APBD Kabupaten/Kota	
	3. Penyampaian Surat Gubernur Nomor 900.1/1091/BKUD5.2 Tanggal 5 Juni 2024 hal Permintaan Narasumber	Surat Gubernur Nomor 900.1/1091/BKUD 5.2 Tanggal 5 Juni 2024 hal Permintaan Narasumber	Hadirnya narasumber dari Dirjen Bina Keuangan Daerah c.q Direktur Perencanaan Penganggaran	
	4. Penyampaian Surat Gubernur Nomor 900.1/1090/BKUD5.2 Tanggal 5 Juni2024 hal Permintaan Narasumber	Surat Gubernur Nomor 900.1/1090/BKUD 5.2 Tanggal 5 Juni2024 hal Permintaan Narasumber	Hadirnya narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	
	5. Pelaksanaan Rakor dana dekonsentrasi terkait percepatan penyusunan	Rakor dana dekonsentrasi terkait percepatan	Adanya informasi kepada Provinsi dan kabupaten/kota terkait:	Kegiatan dilaksanakan pada hari Jumat, 21

	KUA-PPAS APBD Kabupaten/Kota	penyusunan KUA-PPAS APBD Kabupaten/Kota	Penerapan Penyusunan APBD yang disampaikan oleh Pejabat dari Kemendagri, Penyusunan kebijakan umum Anggaran Provinsi NTT Tahun 2025 oleh Plt Kepala Badan Keuangan Provinsi NTT dan penyusunan RKPD TA 2025 yang disampaikan oleh Sekretaris Bappelitbangda Provinsi NTT	Juni 2024 di Hotel Aston.g
	6. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rakor dana dekonsentrasi terkait percepatan penyusunan KUA-PPAS APBD Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Rakor dana dekonsentrasi terkait percepatan penyusunan KUA-PPAS APBD Kabupaten/Kota	Adanya informasi terkait pelaksanaan kegiatan Rakor dana dekonsentrasi terkait percepatan penyusunan KUA-PPAS APBD Kabupaten/Kota	
	7. Penyusunan laporan kegiatan bulan Juni 2024	Laporan kegiatan bulan Juni 2024	Disampaikannya laporan kegiatan bidang pembinaan kab/kota bulan Juni 2024 kepada Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	
	8. Konsultasi dari BPPKAD Kabupaten TTU terkait Ranperda Pertanggungjawaban	Konsultasi dari BPPKAD Kabupaten TTU terkait Ranperda	Terinformasinya mekanisme, jadwal dan tahapan penyusunan Ranperda	Konsultasi dilaksanakan pada hari Jumat, 14 Juni 2024 di

		Pertanggungjawab an	Pertanggungjawaban dan Rancangan kepala Daerah ttg Penjabaran pelaksanaan pertanggungjawaban TA 2023	Badan Keuda Provinsi NTT
	9. Konsultasi dari BPPKAD Kab. Sabu Raijua terkait pertanggungjawaban dan penyampaian LHP	Konsultasi dari BPPKAD Kab. Sabu Raijua terkait pertanggungjawab an dan penyampaian LHP	Terinformasinya mekanisme dan tahapan evaluasi tatacara pelaksanaan evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2023	Konsultasi dilaksanakan pada hari Kamis, 20 Juni 2024
	10. Konsultasi dari BPPKAD Kabupaten Sumba Barat terkait penganggaran pajak kendaraan bermotor PKB, BBNKB dan Pajak MBLB dan pembayaran gaji DPRD masa akhir jabatan	Konsultasi dari BPPKAD Kabupaten Sumba Barat terkait penganggaran pajak kendaraan bermotor PKB, BBNKB dan Pajak MBLB dan pembayaran gaji DPRD masa akhir jabatan	Terinformasinya batas waktu pemberlakuan UU nomor 28 tahun 2009 terhadap Perda pajak PKB, BBNKB dan MBLB dan pembayaran gaji DPRD masa akhir jabatan	Konsultasi dilaksanakan pada hari Senin, 24 Juni 2024 di Badan Keuda Provinsi NTT
H.	Tugas Tambahan : Melaksanakan tugas sebagai Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah dengan rincian :			
	1. Penyelesaian pengesahan DPPA TA 2024 Provinsi NTT	Penyelesaian pengesahan DPPA TA 2024 Provinsi NTT	Penetapan DPPA SKPD TA 2024	

	2. Mengkoordinir penyelesaian Laporan Bulanan, Laporan Semester Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024	1 Laporan Bulan Januari dan 1 Laporan Semester	Terinformasinya tugas pada Badan Keuangan Daerah untuk TA 2024	Dilanjutkan dalam bulan Mei 2024
	3. Penyelesaian administrasi umum dan kepegawaian (Kenaikan Berkala, SKP Tahun 2023 maupun SKP Tahun 2024	Dokumen SKP, Kenaikan Berkala dan SKP 2024	Tersedianya 3 jenis dokumen untuk ditindaklanjuti secara berkala	Berlanjut untuk bulan Mei 2024
	4. Mengikuti evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2023 di Jakarta	Mengikuti evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2023 di Jakarta	SK Menteri Dalam Negeri RI terkait Hasil Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023	Kamis, 27 Juni 2024

c. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Kegiatan ini ditangani oleh Bidang Perbendaharaan dengan Pagu sebesar Rp. 2.380.003.796,- Realisasi Rp. 665.562.966,- (27,96%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan dijelaskan dalam tabel berikut ini:

a. Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)

Realisasi Penerimaan Rp.1.297.204.017.756,61, Realisasi Pengeluaran Rp.704.373.704.561,02,- sisa RKUD Rp.592.830.313.195,59.

b. Realisasi Keuangan khusus Bidang Perbendaharaan dengan anggaran sebesar Rp.2.381.903.796,- sudah terealisasi sampai dengan bulan Februari 2024 Rp.413.410.848,- atau 0.17% yang terdiri dari:

- Sub Kegiatan 5.02.02.1.03.03.01 Koordinasi dan pengelolaan Kas Daerah terealisasi Rp.174.073.749,-, atau 0.42% dari anggaran sebesar Rp.414.559.796,-
- Sub Kegiatan 5.02.02.1.03.03.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD terealisasi sebesar Rp.82.429.000,- atau 0,26% dari anggaran Rp.322.083.000,-
- Sub Kegiatan 5.02.02.1.03.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya belum terealisasi atau 0.00% dari Anggaran sebesar Rp.385.216.000,-
- Sub Kegiatan 5.02.02.1.03.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah sebesar Rp.106.157.599,- atau 0,16% dari Anggaran sebesar Rp.665.180.000,-
- Sub Kegiatan 5.02.02. 1.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas terealisasi Rp.50.750.500,- atau 0.09% dari Anggaran sebesar Rp.594.865.000,-

Tabel 3.12

**Hasil Pelaksanaan Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah
per 30 Juni 2024**

PROGRAM	KEGIATAN	BENTUK/WUJUD	REALISASI	KET
Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Menerima, memverifikasi dan memproses SPP/SPM dari Perangkat Daerah (PD) Lingkup Pemprov. NTT dan selanjutnya diproses menjadi SP2D.	Belanja Daerah Terdiri Dari SP2D : 367 Doc LS Gaji PNSD 38 Doc & Guru (Gaji Induk) LS Gaji 3 Doc Susulan LS Terusan 22 Doc Gaji LS Gaji Ke 13 59 Doc LS Terusan 1 Doc Gaji Ke 13 LS Kekurangan 1 Doc Gaji LS Kekurangan 1 Doc Kenaikan Gaji 8% LS Gaji PPPK 2 Doc LS Gaji Ke 13 47 Doc PPPK LS TPP PPPK 2 LS Susulan 4 Doc Gaji Ke 13 LS Gaji Staf 1 Doc Khusus LS Barang dan 51 Doc Jasa GU 28 Doc TU 3 Doc UP 5 Doc LS TPP 22 Doc LS Gaji 43 Doc Honorer LS Belanja 2 Doc Transfer LS Modal 27 Doc LS Tj. Profesi 2 Doc Guru LS Tj. Khusus 1 Doc	

			Guru LS Tj. Profesi 1 Doc Guru PPPK LS. Tj. Khusus 1 Doc Guru PPPK	
		Membuat SKPP (Pensiun BUP, Pensiun Dini, Janda Duda dan Pindah)	SKPP Pindah : 1 SK SKPP BUP : 103 SK SKPP : 10 SK Meninggal SKPP Diberhentikan : - SK SKPP Pensiun : - SK Dini	
		Membuat Laporan Bulanan tentang : - Data Belanja Gaji Pegawai dan TPP Bulan Mei Tahun Anggaran 2024 untuk Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) - Data Belanja Gaji PPPK dan TPP Bulan Mei Tahun Anggaran 2024 untuk Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) Ke Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)	SuratPengantar : 1. 900.1.3/1131/BKUD3.1 Tgl. 10 Juni 2024	

		Menginput Perubahan data Gaji PNSD dan Guru SMA/SMK se Prov. NTT	Perubahan Gaji, Berkala/Naik Pangkat: PNS : 232 Orang Guru : 204 Orang PPPK Tahap I : 4 Orang PPPK Tahap II : 14 Orang	
		Pembayaran Gaji Rutin Bulanan bagi PNS Lingkup Pemprov. NTT TA. 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi berkas - Penginputan data dalam Aplikasi SIM Gaji Taspen - Pencetakan Daftar Gaji - Pencetakan SP2D - Realisasi Pembayaran 	
		Mengentri Buku Bantu Rekening Kas Daerah Provinsi NTT	Penerimaan : 4.561 Doc Pengeluaran : 367 Doc	
		Menginput Data Bukti Setoran dan SP2D dalam B IX	4.561 Doc	
		Melakukan Rekapitulasi dan penyetoran PFK (Perhitungan Fihak Ketiga), yang terdiri dari beras, Taspen, Iuran Kesehatan, Iuran Ketenaga kerjaan, PPh Ps. 21, Taperum, PPN dan PPh Ps. 22	PNS pada 33 OPD Lingkup Pemprov. NTT, OPD Pengalihan 3 Kab/Kota dan Guru SMA/SMK Pengalihan 22 Kab/Kota	
		Melakukan rekapitulasi	16 OPD dan 15 Bukti Setoran	

		pemotongan dan penyetoran terhadap kredit Kendaraan Roda 2 dan 4 ke kas daerah		
		Melakukan verifikasi terhadap SP2D yang akan dilakukan pencairan	367 SP2D	
		Melakukan pengiriman Daftar Transaksi Harian (DTH) dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Bulan Mei 2024 ke KPP Pratama Kupang	Surat Pengantar Nomor : 900.1.13.1/1114/BKUD3.1 Tanggal 06 Juni 2024	
		Melakukan Pengiriman Daftar Rekapitulasi, bukti billing iuran wajib pegawai dan bukti billing iuran asuransi kesehatan bulan Juni 2024	Surat Pengantar Nomor : 1. 900.1/1189/BKUD3.3 2. 900.1/1190/BKUD3.3 Tgl . 20 Juni 2024	
		Surat Keluar ditujukan kepada: 1. BPK RI	Nomor Surat 900.1/1238/BKUD3 Tgl. 24 Juni 2024	

		<p>Melakukan Konfirmasi Dana Pusat Melalui Lembar Konfirmasi Transfer (LKT) TW 1 2024 ke:</p> <p>Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah Jakarta Kepala KPPN Cabang Kupang</p>	<p>Surat Pengantar Nomor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 900.1/1174/BKUD3.2 2. 900.1/1175/BKUD3.2 <p>Tgl. 19 Juni 2024</p>	
	<p>Pembinaan Bendahara</p>	<p>Membuat Surat Keputusan Gubernur tentang: perubahan ketiga atas lampiran keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 900/263/BKUD3/2023 Tentang Pejabat Pengelola Dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan pada Perangkat Daerah Prov. NTT Tahun Anggaran 2024</p>	<p>Nomor : 900/98/BKUD3/2024</p> <p>Tgl. 04 Juni 2024</p>	

		Membuat Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tentang Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum dalam bentuk Deposito	Nomor : 26 Tahun 2024 Tgl. 06 Juni 2024	
		Membuat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tentang: Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur NTT Nomor: 900/31/BKUD3/2024 Tentang Besaran uang Persediaan Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Prov. NTT Tahun 2024	Nomor : 900/88/BKUD3/2024 Tgl. 16 Mei 2024	
		Melakukan pengiriman bukti pembayaran beras ke Bulog Bulan Mei 2024	33 Setoran	

		Rekapitulasi LHP BPK RI dan Inspektorat Daerah Prov. NTT Keadaan Juni 2024	LHP BPK RI (29 kasus) Nominal Rp. 150.015.137,- LHP Inspektorat Daerah Prov. NTT (749 kasus) Nominal Rp. 7.722.489.087,- Rincian terlampir	
		Penginputan perubahan gaji tanggal 1-10 setiap bulannya pada SIM Gaji Web	Tepat waktu	
		Operator pada Aplikasi Gaji melakukan Print daftar gaji	Untuk dibayarkan pada gaji bulan Juni	
		Pelaporan DAU harus di upload melalui aplikasi SINERGI (sofcopy & hardcopy) yang sudah ditandatangani dan cap basah oleh pejabat yang berwenang, pengiriman paling lambat tanggal 14 setiap bulannya. Apabila tidak dipenuhi maka penyampaian DAU bulan berikutnya di	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak pernah terlambat menyampaikan laporan DAU	

		tunda		
		Penyusunan Laporan Progres Penyerapan Dana Pinjaman Ekonomi (PEN) Daerah antara PT. SMI dan Pemprov. NTT yang dikirim paling lambat setiap bulannya dan laporan tersebut harus terlebih dahulu sudah di reviu oleh Inspektorat daerah sebelum dikirim ke PT. SMI melalui aplikasi REVINA	Selalu tepat waktu	
	Pengagendaan Surat	Surat Masuk Surat Keluar	Total = 162 Surat Total = 35 Surat	

d. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Kegiatan ini ditangani oleh Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan Pagu sebesar Rp. 2.815.638.502,- Realisasi Rp 1.919.624.314,- (68,18%) . Hasil (output) pelaksanaan kegiatan:

1. DAP Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT TA. 2024

Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang terdiri dari sub – sub kegiatan antara lain :

- a. Sub kegiatan rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-lo, dan beban jumlah

- anggaran sebesar Rp. 331.735.212,- sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 terealisasi Rp.195.647.000 atau (58,97%)
- b. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran dengan jumlah Anggaran sebesar Rp.561.726.990,- dan sampai dengan 30 Juni 2024 realisasi Sebesar Rp.411.296.600,- Atau (73,22%) Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :
 - c. Sub kegiatan konsolidasi laporan keuangan SKPD,BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 771.167.000,-sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 terealisasi sebesar Rp.417.996.282,- atau (54,20%)
 - ⇒ Tersusunnya Laporan keuangan pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2023 (Unaudited)
 - ⇒ Tersusunnya laporan keuangan SKPD TA.2023(Unaudited)
 - ⇒ Tersusunnya laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2023 (Audited)
 - ⇒ Tersusunnya Laporan keuangan SKPD TA.2023(Audited)
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT, dianggarkan sebesar Rp.1.150.506.300,- dan realisasi sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp. 894.684.432,- atau (77,76%). Hasil (ouput) pelaksanaan kegiatan :
 - ⇒ Tersusunnya Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi NTT TA.2023
 - ⇒ Tersusunnya rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi NTT TA.2023.
 - ⇒ Tersusunnya Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi NTT TA 2023.

⇒ Tersusunya Peraturan Gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi NTT TA 2023

Tabel 3.13
Realisasi Fisik Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Bidang Akuntansi dan Pelaporan
per 30 Juni 2024

Program	Rincina Kegiatan	Target (dokumen/ kegiatan)	Realisasi (dokumen/ kegiatan)	Ket
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Akuntansi & Pelaporan Keuangan Daerah	1. Sub Sub kegiatan rekonseliasi dan ferifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja,pembiayaan .pendapata-IO, dan Beban	3 Dokumen	3 Dokumen	
	2. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran			
	3. Sub kegiatan konsolidasi laporan keuangan SKPD,BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	4 Dokumen	34Dokumen	

	4. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT	4 dokumen	4 dokumen	
--	---	-----------	-----------	--

e. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan ini ditangani oleh Bidang Anggaran dan Bidang Akuntansi Pelaporan, terdiri dari Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah dan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dengan Pagu sebesar Rp. 851.543.405.386,-Realisasi Rp. 268.439.469.093,-(31,52%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan:

⇒ Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

4.1 Permasalahan dan Solusi

Dalam proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang pada Badan Keuangan Daerah terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

a. Permasalahan

1. Sebagian besar (bidang/sub bidang/sekretariat/sub bagian) belum menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tepat waktu sehingga terjadi keterlambatan.
2. Ketersediaan ASN yang masih terbatas.
3. Kurangnya bimtek atau diklat karena kurangnya ketersediaan dana

b. Solusi

1. Masing-masing bidang/sub bidang/sub bagian segera menyampaikan Laporan Bulanan paling lambat satu minggu setelah diminta.
2. Mengusulkan penambahan ASN untuk ditempatkan pada Sekretariat.
3. Ditambah dana untuk bimtek dan diklat untuk seluruh pegawai

2. Bidang Anggaran

a. Permasalahan

1. Terdapat beberapa Usulan Pergeseran Anggaran dari SKPD terkait Pelaksanaan Kegiatan yang Sifatnya Mendesak atau Perubahan Prioritas Pembangunan baik di Tingkat Nasional atau Daerah.
2. Terdapat Kendala pada Proses verifikasi dokumen pengajuan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai bulan Maret 2024 pada beberapa Perangkat Daerah tidak dapat Melakukan Proses Pencairan

karena hasil Verifikasi oleh tim TPP tidak segera diperbaiki oleh Perangkat Daerah.

b. Solusi

1. Terkait Permasalahan tersebut Pemerintah Perlu melakukan Penyesuaian/Perubahan pada Peraturan Gubernur NTT Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024.
2. Tim TPP Terus Berkoordinasi Mengingatkan Perangkat Daerah untuk Segera Menindaklanjuti Hasil Verifikasi Agar Pelaksanaan Pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Maret 2024 Dapat Segera Terealisasi.

3. Bidang Perbendaharaan

a. Permasalahan

1. Pelaksanaan Penatausahaan SIPD RI belum dijalankan.
2. Jaringan VPN Bank NTT Bermasalah menyebabkan proses posting SP2D terhambat
3. Kekurangan sarana dan prasarana berupa computer dan printer.

b. Solusi

1. Diperlukan pelatihan SIPD RI bagi seluruh pengelola
2. Pihak teknisi Bank NTT sudah datang memperbaiki
3. Bidang perbendaharaan perlu melakukan pengadaan computer dan printer untuk menunjang pelaksanaan dan kelancaran tugas rutin.

4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

a. Permasalahan

Berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang Akuntansi dan Pelaporan permasalahan yang terjadi adalah penyerapan anggaran per 30 Juni 2024 untuk bidang akuntansi dan pelaporan masih tergolong rendah, hal ini disebabkan karena realisasi keuangan mengikuti schedule/ waktu pelaksanaan program/kegiatan.

5. Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota

a. Permasalahan

1. Belum tepat waktu Kabupaten/Kota menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) setiap bulan dalam Tahun Anggaran 2024;
2. Belum tepat waktu ditetapkan 1 (satu) Peraturan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah dan 4 (empat) Peraturan Kepala Daerah tentang system dan prosedur; Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Akuntansi Daerah, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Analisis Standar Belanja;
3. Belum dilaporkannya data laporan keuangan BLUD kabupaten/Kota secara lengkap;
4. Dalam Bulan Juni tidak ada Kabupaten/Kota yang mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk dievaluasi sesuai dengan ketentuan.

b. Solusi

1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar menyampaikan LRA tepat waktu setiap bulan sesuai jadwal yang ditentukan melalui grup whatsapp maupun dihubungi secara langsung.
2. Pemerintah Provinsi NTT akan tetap melaksanakan fungsi koordinasi dan konsultatif yang intensif dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota agar dapat segera menyusun dan menetapkan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah dan 4 (empat) Peraturan Kepala Daerah tentang system dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Akuntansi Daerah, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Analisis Standar Belanja, dan data laporan keuangan BLUD kabupaten/Kota .
3. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengarahkan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat agar hal-hal teknis yang

menjadi koreksi dalam Hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban TA 2023 menjadi bahan perbaikan untuk tahun anggaran berikutnya agar tidak mengulangi ataupun dapat meminimalisir kesalahan yang sama sehingga ada perbaikan kinerja pengelolaan keuangan daerah di tahun mendatang.

4. Mendorong percepatan penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

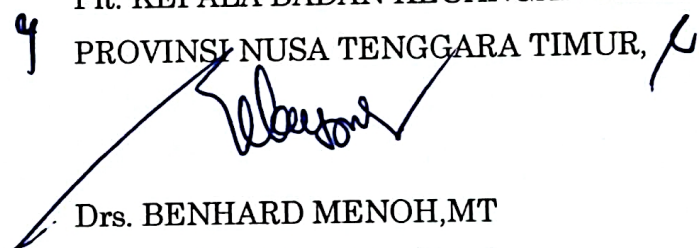
BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024 Badan Keuangan Daerah ini disusun, sebagai bahan masukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja pada lingkup Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024. Hal-hal lain yang belum dimuat dalam panduan ini akan dibahas saat evaluasi berlangsung.

Kupang, Juli 2024

Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


Drs. BENHARD MENOH, MT
PEMBINA TINGKAT I (IV/B)
NIP. 19720512 199101 1 001